

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan meningkat secara signifikan. Populasi dunia diperkirakan akan mencapai 8,5 miliar jiwa pada tahun 2030 menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation*. Sebagian besar pertumbuhan populasi ini akan datang dari negara-negara berkembang seperti Nigeria, Pakistan, India dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk per Juni 2022 adalah sebesar 275,361,267 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 275 juta, Indonesia diproyeksikan menjadi negara ke-empat terpadat di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan China. Pertumbuhan penduduk dapat dipahami sebagai keselarasan antara penambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Faktor penambahan dan pengurangan penduduk merupakan faktor alamiah terjadinya pertumbuhan penduduk karena berkaitan dengan siklus manusia yaitu kelahiran dan kematian. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah yakni migrasi atau perpindahan penduduk.

Idealnya pertumbuhan penduduk harus disertai dengan perencanaan yang matang dari pemerintah di suatu Negara. Perencanaan mengenai kependudukan bermanfaat bagi pemerintah untuk membantu menyusun kebijakan dalam hal

pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan maupun sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak terkendali dikhawatirkan akan menjadi beban pembangunan nasional karena pertumbuhan penduduk merupakan isu multisektor atau dapat dikatakan berhubungan dan berdampak pada banyak sektor lain, salah satunya adalah sektor lingkungan. Pertumbuhan populasi yang dibarengi dengan urbanisasi, ekspansi ekonomi, dan industrialisasi andil dalam peningkatan yang signifikan terhadap limbah padat di seluruh dunia (Kaushal et al, 2015). Kondisi ini juga sedikit banyak dipengaruhi kebiasaan hidup, perilaku serta pola konsumsi masyarakat yang berbeda-beda yang mempengaruhi jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan.

Pengendalian sampah di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 1 disebutkan setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah dianggap sebagai penghasil sampah. Dapat dikatakan bahwa sampah bersumber dari berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang tidak termanfaatkan lagi. Jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia memiliki korelasi lurus dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.

Indonesia dengan wilayahnya yang mencakup luas daratan sebesar 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km² memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Data sensus dari Badan Pusat Statistik memamparkan, dari 38 provinsi di Indonesia, Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah

penduduk terbanyak dengan angka hampir mencapai 49 juta penduduk, disusul Jawa Timur dengan 40,6 juta jiwa, urutan ketiga ditempati Provinsi Jawa Tengah dengan 36,5 juta jiwa, Sumatera Utara dengan penduduk hampir mencapai 15 juta jiwa, dan urutan kelima diduduki DKI Jakarta dengan 10,6 juta penduduk. Untuk melihat data tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terkait provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dapat kita simak pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Provinsi Terpadat di Indonesia

Provinsi	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)		
	2020	2021	2022
Jawa Barat	48,274,200	48,782,400	49,405,800
Jawa Timur	40,665,700	40,878,800	41,150,000
Jawa Tengah	36,516,000	36,742,500	37,032,400
Sumatera Utara	14,799,400	14,936,200	15,115,200
DKI Jakarta	10,562,100	10,609,700	10,680,000

Sumber: Sensus Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1, meskipun Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kelima dengan penduduk terpadat di Indonesia, namun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menunjukkan Kota Jakarta Timur menempati urutan pertama kota di Indonesia dengan jumlah penduduk terpadat sebesar kurang lebih 3 juta penduduk.

Hal ini tidak terlepas dari arus urbanisasi dan pembangunan infrastruktur secara masif di Pusat Kota yang menarik banyak pendatang untuk bermigrasi ke kota-kota besar, seperti Jakarta. Dengan populasi penduduk yang kurang lebih mencapai 10,6

juta jiwa per tahun 2022, Jakarta tentunya menghadapi banyak tantangan dan permasalahan dari berbagai sektor, salah satunya *issue* di sektor lingkungan. Terdapat korelasi lurus antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan volume sampah yang dihasilkan. Dimana dapat dipahami jika populasi penduduk di suatu wilayah besar, maka volume sampah yang dihasilkan wilayah tersebut juga tinggi. Sebaliknya, jika populasi penduduk di suatu wilayah cukup sedikit, maka kuantitas sampah yang di wilayah tersebut juga tidak banyak.

Situasi ini juga diperkeruh dengan persoalan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), yang mana sampah-sampah yang dihasilkan warga Jakarta yang dibuang ke TPST Bantar Gebang hampir tidak mampu lagi mengelola volume sampah yang meningkat di kota Jakarta. Besaran volume sampah di DKI Jakarta per tahun 2021 dapat kita simak pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Volume Sampah di DKI Jakarta Menurut Jenis Sampah (ton) Tahun 2021

	Organik	Anorganik	Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	Jumlah
Jumlah (ton)	3.888,19	3.305,20	40,44	7,233,83

Sumber : Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta

Dari tabel 1.2 dapat dilihat per tahun 2021 jenis sampah yang paling dominan di Indonesia adalah sampah organik (sisa makanan dan tumbuhan) sebesar 3.800 ton, diikuti sampah anorganik (sampah plastik atau botol bekas) sebesar 3.300 ton dan sampah jenis lain yaitu sampah dengan bahan beracun dan berbahaya (B3) sebesar

40,4 ton. Untuk mengetahui lebih rinci terkait jenis sampah yang sudah di bagi sesuai kategorinya, dapat disimak pada tabel 1.3 presentase komposisi sampah dibawah ini:

Tabel 1.3 Presentase Komposisi Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021

Komposisi Sampah (%)	Organik	Kertas	Plastic	Gelas/Kaca	Logam	Kain	Kayu	Lain-lain
2021	53.75	14.92	14.02	2.45	1.82	1.11	0.87	10.54

Sumber : Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui komposisi sampah organik sebesar 53.75% yang mana jenis sampah ini mendominasi komposisi sampah di Jakarta. Selanjutnya adalah sampah anorganik dimana termasuk di dalamnya adalah kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, dan kayu. Terakhir adalah komposisi sampah logam yang termasuk ke dalam jenis sampah bahan beracun dan berbahaya sebesar 1.82%. Jika dilihat dari besaran presentase untuk sampah jenis bahan beracun dan berbahaya yang hanya sebesar 1.82%, volume sampah B3 memang tergolong sedikit. Namun dari kuantitasnya yang lebih sedikit dari jenis sampah lainnya, sampah B3 menyimpan potensi bahaya apabila sampah ini tidak dikelola dengan benar.

Sampah di definisikan sebagai sisa padat dari kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Komposisi sampah dunia sedikit banyak berbeda di setiap negara, mencerminkan perbedaan gaya hidup dan konsumsi sehari-hari masyarakat yang berbeda di setiap negara, sehingga volume limbah yang

dihasilkan juga unik. Sebagian besar limbah padat dunia berasal dari aktivitas sehari-hari atau manusia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung zat, energi, atau komponen lain yang tergantung konsentrasi, sifat, atau jumlahnya dapat mencemari lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, atau mengancam kehidupan manusia dan lainnya. Pengelompokan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dibagi menjadi 3 jenis, yakni Limbah B3 dari sumber spesifik (kegiatan industri); limbah B3 dari sumber tidak spesifik (kegiatan pemeliharaan alat pada industri), limbah B3 dari kegiatan rumah tangga (limbah elektronik, bekas pengharum ruangan, deterjen, dsb).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki barang elektronik. Ketika barang-barang ini rusak dan tidak dapat diperbaiki, seringkali benda-benda ini disimpan atau langsung dibuang. Sayangnya, kebanyakan limbah elektronik di Indonesia dibuang ke tempat sampah umum atau dijual kembali ke sektor informal, seperti pedagang rongsokan. Fenomena ini dibenarkan oleh Ahmad Ashov Birri, juru bicara Greenpeace Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan limbah elektronik yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan. Greenpeace Indonesia pada tahun 2016 secara khusus melakukan kajian penggunaan ponsel di

Indonesia dengan *sample* limbah elektronik yaitu ponsel. Survei ini menunjukkan bahwa 59% responden dengan penghasilan bulanan kurang dari Rp 5 juta rupiah tidak ragu untuk membeli ponsel baru meskipun ponsel mereka masih berfungsi dengan baik. Dengan rentang usia simpan yang cukup singkat serta menjamurnya produk elektronik baru di pasaran, hal ini menambah peluang meningkatnya produksi limbah elektronik di Indonesia.

Merujuk pada ketentuan pokok pengelolaan limbah B3, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, daur ulang, dan/atau pergudangan. Dalam peraturan ini juga diatur pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola limbah B3, salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 sangat penting, karena memiliki tanggung jawab pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan penyimpanan sementara barang elektronik milik warga.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai unsur organisasi Pemerintah Provinsi yang mengelola pelayanan di bidang kebersihan. Dengan kewenangan dan tanggung jawab di sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup menuangkan inovasinya di bidang pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya (B3) dengan meluncurkan layanan penjemputan limbah elektronik dan unit *dropbox e-waste* di ruang publik.

Adapun untuk mengetahui besaran volume pengumpulan limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), DLH Kota Jakarta dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah B3 Rumah Tangga Tahun 2020

Sumber Sampah	Jenis Limbah (kg)			
	Kemasan Plastik	Kemasan Kaleng	Limbah Medis	E-Waste
Sudin LH Jakarta Pusat	410,90	1.076,33	13,27	2.140,47
Sudin LH Jakarta Utara	561,32	3.265,56	50,36	2.618,14
Sudin LH Jakarta Barat	230,20	1.168,10	103,35	1.020,00
Sudin LH Jakarta Selatan	339,50	974,09	579,99	1.770,20
Sudin LH Jakarta Timur	408,25	1.475,22	5,00	2.162,70
Sudin LH Kep. Seribu	116,78	360,62	5,13	360,33
Dropbox Halte Trans JKT	-	-	-	169,11
Dropbox Stasiun Cikini	-	-	-	40,38

Sumber: PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Inovasi layanan ini berupa program pengumpulan sampah elektronik di rumah warga, serta penyediaan layanan kotak sampah elektronik di sejumlah tempat umum seperti halte bus Transjakarta, Stasiun, dan Kantor Pemerintahan di wilayah daerah Jakarta. Inovasi secara umum dapat dipahami sebagai ide kreatif yang pelaksanaannya terdiri dari pemecahan masalah atau proses mengadopsi dan mempraktikkan cara kerja baru atau mendapatkan hasil (Sangkala, 2014: 26).

Definisi inovasi sangat beragam dan berasal dari berbagai sudut pandang. Rogers mengatakan bahwa inovasi adalah ide, metode, atau hal yang ditemukan orang baru ketika berpindah dari satu unit adopsi ke unit adopsi lainnya. Damanpour menambahkan bahwa produk atau layanan baru, teknologi proses produksi baru,

sistem struktural dan administrasi baru, atau rencana baru untuk anggota organisasi dapat menjadi contoh inovasi.

Layanan *Dropbox E-Waste* pertama kali diluncurkan pada Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program pengumpulan sampah elektronik pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018. Sampai dengan tahun 2022, unit kotak sampah elektronik (*Dropbox E-Waste*) telah terpasang di 36 titik penempatan di Kota Jakarta seperti terlihat pada tabel 1.5 dibawah ini:

Tabel 1.5 Lokasi *Dropbox E-Waste*

No.	Titik Penempatan <i>Dropbox E-Waste</i>	Jumlah
1	Halte transportasi Jakarta (Trans Jakarta)	11
2	Stasiun Kereta	2
3	Balaikota	3
4	Perusahaan Swasta	2
5	Kantor Kecamatan dan Suku Dinas	17
6	Sekolah	1
	Total	36

Sumber: Dinas Pengelolaan Limbah B3 DKI Jakarta DLH.

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa jumlah kotak e-waste di Kota Jakarta saat ini berjumlah 36 unit yang terletak fasilitas umum. Diharapkan dengan model pelayanan yang sederhana dan terlihat secara fisik ini, masyarakat dapat terlayani dengan baik dan membuang sampah elektroniknya pada fasilitas yang telah disediakan. Selain itu, sampah elektronik berukuran besar dikelola dengan cara pengumpulan dan penjemputan ke domisili pemohon, dimana sampah elektronik

tersebut akan dikumpulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan ketentuan berat sampah elektronik tersebut minimal 5 kg dan memiliki KTP Kota Jakarta.

Perlu diketahui bahwa sebelum peluncuran inovasi daur ulang dan pengumpulan limbah elektronik, pengelolaan limbah B3 di Kota Jakarta belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini dinyatakan oleh Rosa Ambarwati, Kepala Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup DKI, yang mengatakan inovasi sistem pembuangan limbah elektronik ini awalnya hadir sebagai fungsi dari Divisi Pengelolaan Limbah B3 DLH DKI Jakarta sebagai jawaban atas keinginan masyarakat yang ingin menjaga lingkungannya dari produk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Dari Tahun 2017 kebawah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum menangani pengelolaan sampah elektronik sehingga sampah-sampah tersebut cenderung ditinggalkan di tempat sampah umum atau diserahkan ke sektor informal seperti pedagang rongsokan.

Dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, tentu banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengevaluasi kembali pengelolaan limbah elektronik ini. 36 titik penempatan *Dropbox E-Waste* dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah elektronik di Kota Jakarta. Selain itu dari sisi masyarakat, sulitnya untuk menyampaikan pemahaman kepada warga Jakarta juga dihadapi oleh DLH. Kesenjangan pengetahuan tentang bahaya dan efek dari bahan limbah beracun dan berbahaya terjadi kepada warga

kelas menengah ke bawah yang lebih memilih opsi menjual kembali limbah elektroniknya ke sektor informal seperti pedagang rongsokan karena dinilai barang tersebut masih memiliki nilai jual.

Kondisi inilah yang menjadi alasan penerapan *Dropbox E-Waste*. Ide inovasi ini merupakan hasil inisiatif dari Bidang Pengelolaan Kebersihan, Bagian Pengelolaan Sampah B3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Inovasi pengelolaan limbah elektronik Dropbox dan pengumpulan limbah elektronik saling terkait untuk memudahkan orang yang ingin membuang limbah elektroniknya. Inovasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan *e-waste* yang tidak dikelola dengan baik. Program *dropbox* limbah elektronik mengumpulkan limbah elektronik kecil seperti ponsel, baterai, tablet, *power bank*, *charger* dan barang lain yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sementara itu, *pengumpulan e-waste* untuk limbah-limbah elektronik berukuran besar seperti AC, mesin cuci, televisi, kulkas dan barang-barang elektronik lainnya.

Dari program *dropbox* hingga pengumpulan limbah elektronik, DLH Kota Jakarta telah menerapkan beberapa strategi untuk mewujudkan program tersebut. Strategi yang diterapkan merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tugas dan fungsi pelayanan yaitu pelayanan publik. Dengan demikian, program *e-waste* pada prinsipnya merupakan layanan yang memudahkan kehidupan masyarakat. Program ini melibatkan sejumlah pihak berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup,

masyarakat dan pihak ketiga yakni PT Citra Asia Raya sebagai pengelola terakhir dari pengumpulan limbah elektronik ini.

Latar belakang sebelumnya menarik minat penulis untuk menganalisis serta menjabarkan pelaksanaan inovasi pengelolaan limbah elektronik, dalam konteks ini adalah program *dropbox e-waste* di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan inovasi *dropbox e-waste* yang telah dilakukan Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah yang Akan Diteliti

1. Bagaimana inovasi layanan *dropbox e-waste* di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat inovasi layanan *dropbox e-waste* di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan penulis dari hasil pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis layanan *dropbox e-waste* di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk inovasi pelayanan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan ukuran lima atribut inovasi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat layanan *dropbox e-waste* di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori pelayanan publik dan memperluas pengetahuan yang ada khususnya mengenai pelayanan pengelolaan limbah elektronik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang dunia praktek yang diperoleh selama masa perkuliahan dan memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian sesuai metodologi ilmiah.

b. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat dimasukkan dalam kumpulan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar bagi penelitian ilmiah tambahan khususnya yang terkait dengan inovasi dalam pelayanan publik.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun gambaran tentang inovasi pelayanan pengelolaan *e-waste* di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

d. Bagi Pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik berupa saran terkait inovasi layanan pengelolaan sampah elektronik di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
1.	Inovasi di sektor publik Guru STIA-LAN untuk mata kuliah Difusi inovasi dalam manajemen, 2018	Yogi Suvarno	<ul style="list-style-type: none">- Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA), yang mendirikan Penghargaan Layanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengakui inovasi di sektor publik.- Inovasi memiliki 5 (lima) atribut menurut Rogers Everett M.- Karakteristik inovasi di sektor publik relatif berbeda dengan inovasi di sektor bisnis. Perbedaannya terletak pada	<p>Lokasi dan fokus penelitian ini berbeda dengan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian ini, fokusnya adalah pada permasalahan yang muncul dari upaya pengenalan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga publik.</p> <p>Kaitannya dengan kajian penulis adalah bahwa kajian ini menyebutkan atribut inovasi Rogers dan perbedaan antara inovasi di sektor bisnis dan sektor publik.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>prinsip organisasi, sumber daya manusia, indikator kinerja dan sumber pengetahuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah tampaknya sedang terburu-buru meluncurkan situs web atau situs layanannya sendiri, tetapi hanya sedikit yang bersifat interaktif. Kebanyakan dari mereka hanya menampilkan informasi statis. - Beberapa hambatan adopsi TI di lembaga publik adalah masalah kepercayaan dan legitimasi, akuntabilitas, infrastruktur, serta masalah literasi dan gagap teknologi. 	<p>Kesimpulan ini digunakan penulis sebagai gambaran atribut inovasi yang digunakan dalam penelitian penulis.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
2.	<p>Dampak faktor ekonomi dan demografi terhadap timbunan sampah di ibu kota provinsi Jawa dan Sumatera</p> <p>Jurnal Teknik Lingkungan Volume. 21 Tidak. 1, 2015 (hlm. 39-47)</p>	<p>Gita Prajati, Tri Padmi dan Benno Rahardian</p>	<p>Limbah Padat Menunjukkan Korelasi Aspek positif dari perkembangan ekonomi global: Menurut beberapa teori, produksi limbah suatu negara berkorelasi langsung dengan pendapatannya. Negara-negara bergaji rendah akan menghasilkan lebih sedikit pemborosan daripada negara-negara dengan gaji liga besar.</p> <p>Sistem pengelolaan sampah di Indonesia dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan jika tidak mampu mengimbangi laju penumpukan sampah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan sampah yang tepat.</p>	<p>Kajian ini berbeda dengan penulis karena wilayah kajian berada di beberapa kota di Indonesia yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Serang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya adalah kota-kota yang masuk dalam daftar ini.</p> <p>Hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan sekaligus memperkuat latar belakang penelitian mengenai korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulan sampah adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika nilai GRP dan pertumbuhan ekonomi kota rendah, maka timbulan sampah perkotaan juga rendah. - Kota-kota dengan proyeksi timbulan sampah yang besar juga membutuhkan truk sampah besar dan pembangkit listrik tenaga panas. Selain itu, biaya pengelolaan sampah akan meningkat seiring dengan meningkatnya timbulan sampah. 	<p>pertumbuhan penduduk dan sampah di kota.</p>
3.	Inovasi Pelayanan	Andi Sri Wahyuni	- Inovasi dalam administrasi publik	Kajian ini memiliki fokus dan fokus yang

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
	<p>Pelayanan Publik PT PLN Kabupaten Kepulauan Selayar</p> <p>Skripsi dari Universitas Hasanuddin, 2016</p>		<p>adalah tentang efisiensi, kreativitas, dan tanggapan unik terhadap masalah baru atau jawaban baru atas masalah lama.</p> <p>- Menurut <i>Harvard Business Essentials</i> (2003) ada 6 (enam) sumber inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan baru, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Saran dan ide konsumen (<i>use of ideas of the buyer</i>) 3. Pengguna utama (<i>lead users</i>) adalah perusahaan dan individu, konsumen dan pengguna non-konsumen utama yang perlu menyesuaikan diri 	<p>berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menggunakan model proses inovasi Meyer dan Garg untuk mengukur keberhasilan inovasi layanan PT. zloty (persero).</p> <p>Kaitannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menambah khazanah teori tentang inovasi di bidang jasa, karena fokusnya hampir sama yaitu untuk mengetahui penerapan inovasi di masyarakat.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>dengan wilayah mereka.</p> <p>4. Desain yang dipahami konsumen (desain ekspresif) Ide-ide inovatif dihasilkan dengan mengamati penggunaan produk dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum dipenuhi oleh pengguna.</p> <p>5. <i>Invention</i> (penemuan vaksin) Ide-ide inovatif diperoleh melalui penelitian dan pengembangan formal.</p> <p>6. <i>Skunkworks</i>, ide-ide inovatif diperoleh dengan mempekerjakan orang-orang berbakat yang</p>	

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>memiliki perspektif berbeda dari organisasi dalam pemecahan masalah.</p> <p>- Ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penciptaan nilai dalam inovasi pada penelitian ini adalah tipe integrasi menurut De Mayer dan Garg (Fontana: 2011), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi proyek dengan visi strategis organisasi 2. Integrasi abadi antara fase proyek yang berbeda 3. Integrasi fungsi di seluruh proyek 4. Integrasi dengan lingkungan 	

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
4.	<p>Inovasi Pelayanan Publik (Contoh Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang)</p> <p>Skripsi dari Universitas Diponegoro 2016</p>	<p>Martin Prasetyo Muda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPPT terkait dengan investasi, proses dan hambatan yang menyertai inovasi dalam layanan investasi. - Salah satu kabupaten yang berhasil menerapkan inovasi investasi adalah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sragen berhasil menginvestasikan senilai Rp 1,2 triliun dalam satu kuartal. - Inovasi investasi yang dilakukan oleh BPPT Kota Semarang: 	<p>Kajian ini memiliki lokus dan fokus yang berbeda dengan kajian penulis. Kajian ini menganalisis 3 jenis inovasi yang telah dilakukan oleh BPPT yaitu inovasi proses, inovasi pelayanan dan inovasi sistem. Sedangkan dalam penelitiannya, penulis menggunakan teori inovasi atributif menurut Rogers.</p> <p>Berkaitan dengan kajian penulis, terdapat beberapa inovasi teori dalam kajian ini yang berguna sebagai gambaran untuk memperluas cakupan teori yang akan</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi Teknologi 2. Inovasi Layanan 3. Inovasi Sistem <p>- Hambatan inovasi pelayanan penanaman modal di BPPT Kota Semarang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran belum berdasarkan kinerja 2. Kurangnya dukungan nyata untuk bawahan dari manajemen 3. Jumlah sumber daya manusia yang tidak mencukupi 4. Aplikasi investasi terhubung ke pusat, sehingga jika terjadi 	digunakan dalam kajian penulis.

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>kesalahan saat memasukkan data, diperlukan proses penyempurnaan yang lama.</p> <p>- Terdapat 8 (delapan) faktor penghambat tumbuhnya inovasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal 2. Ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi 3. Teknologi tersedia, tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi 4. Tidak ada penghargaan atau insentif untuk inovasi 5. Kemampuan rendah 	

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>6. Perencanaan dan penganggaran jangka pendek</p> <p>7. Ada tekanan administrative</p> <p>8. Budaya Penghindaran Risiko</p>	
5.	<p>Pemberdayaan Masyarakat dengan Program Sutra Emas (Studi Inovasi Kesehatan di Puskesmas Kepanjen Kab. Malang)</p> <p>Jurnal Administrasi Publik</p>	<p>Ilmu Usrotin Choiriyah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep inovasi kesehatan melalui program Golden Silk di Puskesmas Kepanjen Kab. Miskin - Program Sutra Emas merupakan salah satu inovasi di bidang kesehatan pemerintah Kabupaten Malang. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk melancarkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi faktor risiko di 	<p>Kajian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penulis. Fokusnya adalah pada pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui 3 fase proses, yaitu fase kesadaran, fase peningkatan kapasitas, dan fase pengembangan kecerdasan.</p> <p>Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan tambahan pengetahuan tentang definisi inovasi yang dapat</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
	Volume. 4 Tidak. 1, 2016 (hlm. 57-74)		<p>masyarakat, menurunkan AKI dan AKB, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam UKBM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi inovasi yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan teori Hills, Gerald. - Program Golden Silk merupakan inovasi kesehatan berbasis teknologi informasi melalui website yang dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 	ditambahkan dan disesuaikan dengan penelitian penulis.
6.	Dinamika penduduk di Ibukota Jakarta	Rahmatullah	- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan kuantitas,	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penulis. Fokusnya adalah pada

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
	<p data-bbox="254 678 596 711">Universitas Indraprast PGRI</p> <p data-bbox="254 748 338 781">Jakarta</p> <p data-bbox="254 841 537 873">Volume. VIII №2, 2017</p> <p data-bbox="254 933 401 966">(hlm. 54-67)</p>		<p data-bbox="909 402 1388 565">kualitas dan kesejahteraan penduduk di Provinsi DKI Jakarta dari berbagai perspektif demografi.</p> <ul data-bbox="873 602 1388 1300" style="list-style-type: none"> - Komposisi penduduk Kota Jakarta pada tahun 2016 terdiri dari 71,27% penduduk usia kerja yaitu 15-64 tahun, 24,85% penduduk belum usia kerja yaitu 0-14 tahun, dan 3,89% penduduk lanjut usia. populasi. - Kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan masalah bagi lingkungan, karena daya dukungnya tidak lagi memadai. Pemukiman, limbah atau sampah kota, dan kurangnya lahan 	<p data-bbox="1413 402 1934 565">perkembangan dinamika kependudukan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p> <p data-bbox="1413 716 1934 1019">Kaitannya dengan kajian penulis adalah kajian ini menemukan beberapa indikasi permasalahan laju pertumbuhan penduduk di Kota Jakarta, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran fenomena kajian penulis.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>untuk ruang publik menjadi pekerjaan rumah tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga warga kota itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta 2017, jumlah penduduk Kota Jakarta mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2016. 	
7.	<p>Kebijakan limbah elektronik secara global dan lokal</p> <p>Jurnal Teknik Lingkungan</p>	Sri Wahyono	<ul style="list-style-type: none"> - <i>E-waste</i> termasuk dalam limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). <i>E-waste</i> sebenarnya merupakan sumber material yang berharga, namun perlu ditangani dengan baik agar dapat kembali bernilai. - Metode yang dapat digunakan untuk 	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan fokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh gambaran volume sampah elektronik global dan nasional yang mungkin berguna untuk pembahasan penelitian penulis.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
	<p>Volume. 14 #1, 2013</p> <p>(hlm. 17-24)</p>		<p>mengetahui jumlah <i>e-waste</i> yang dihasilkan adalah metode prediksi yaitu analisis data penggunaan jumlah barang elektronik dalam negeri, jumlah barang ekspor, dan jumlah barang impor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah elektronik biasanya mengandung komponen berbahaya dan beracun seperti merkuri, timbal, kadmium, kromium, arsenik, dan PCB, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. - Limbah elektronik mengandung bahan bernilai tinggi seperti kaca, besi dan baja, logam mulia dan logam tanah 	

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>jarang yang dapat didaur ulang untuk nilai jual kembali. Sayangnya, seringkali sektor informal melakukan proses daur ulang limbah elektronik tanpa mempertimbangkan metode daur ulang yang ramah lingkungan.</p>	
8.	<p>Model pengelolaan limbah elektronik baru di Indonesia berdasarkan integrasi seni</p> <p>Institut Politeknik Negeri</p>	<p>Hosinatus Sadah, Sifaul Fuada, SPd dan Nurukh Hida, SPd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang metode pengelolaan e-waste yang baru dan gambaran penerapannya di Indonesia. - Diketahui, jumlah pengguna seluler di Indonesia pada akhir 2010 mencapai 180 juta, selain itu, konsumsi televisi per tahun mencapai 4,3 juta unit, lemari 	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan fokus yang berbeda dengan penelitian penulis.</p> <p>Hasil penelitian ini memberikan beberapa wawasan kepada penulis terkait isu <i>e-waste</i> di Indonesia yang dapat digali dalam kajian penulis.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
	<p>Malang</p> <p>Volume. 7, 2015</p> <p>Urusan</p>		<p>es - 2,1 juta unit, AC dan mesin cuci - 900 ribu unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber terbesar limbah elektronik adalah pelabuhan kecil dan ilegal di Batam, Wakatobi, dan Pare-Pare. Pelabuhan ini merupakan pusat distribusi barang elektronik bekas yang berasal dari Amerika Serikat. - Daur ulang limbah elektronik yang dominan dilakukan oleh sektor informal, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari proses ini. - Penerapan model pengelolaan sampah 	

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>ini membutuhkan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan, antara lain pemerintah sebagai pembuat kebijakan, produsen sebagai pelaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan <i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i>, dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan.</p>	
9.	Konsekuensi & Penanganan Limbah Elektronik	Josua Johnny Hardianto Banjar Nahor	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan <i>e-waste</i> yang dilakukan oleh AS, Jepang, Australia dan Swiss agar dapat diimplementasikan di Indonesia. - Berdasarkan kajian ini, <i>e-waste</i> dapat 	<p>Kajian ini memiliki fokus dan fokus yang berbeda dengan penulis. Kaitannya dengan penelitian penulis, penelitian ini memberikan gambaran tentang cara penanganan <i>e-waste</i> yang baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan dan</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
	<p>Jurnal Rekayasa</p> <p>Volume. 14 #2, 2019</p> <p>(hlm. 116-119)</p>		<p>dipahami sebagai barang elektronik yang sudah mendekati akhir siklus hidupnya dan siap digantikan dengan barang baru yang lebih maju dan berkualitas. Limbah-limbah elektronik berdampak negatif terhadap atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Bahan berbahaya dan beracun yang terkandung dalam limbah ini berkontribusi terhadap pemanasan global.</p> <p>- Selain merusak lingkungan, <i>e-waste</i> yang tidak tertangani dengan baik juga dapat menyebabkan berbagai penyakit</p>	<p>mengganggu kesehatan manusia. Saran yang diberikan dalam penelitian ini juga bermanfaat sebagai masukan bagi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap pihak-pihak yang berwenang mengelola <i>e-waste</i> di DKI Jakarta.</p>

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			<p>seperti kanker, penurunan daya tahan tubuh, dan penurunan sistem saraf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti Undang-Undang Daur Ulang Peralatan Tertentu (LRHA), yang membebankan kewajiban tertentu kepada produsen dan konsumen; Penanganan Produk Peraturan yang mengatur penanganan limbah elektronik jenis televisi dan komputer; dan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Sistem Pengelolaan Limbah 	

No.	Judul Penelitian/Jurnal	Peneliti	Temuan Penelitian / Hasil Penelitian	Perbedaan dalam Penelitian
			Berbahaya.	
10.	<p>Memperkirakan aliran limbah elektronik di DKI Jakarta menggunakan analisis aliran material (MFA)</p> <p>Jurnal Ilmu Lingkungan</p> <p>Volume. 17 Tidak. 1, 2019</p> <p>(hlm. 120-129)</p>	<p>Dino Rimanto, Erliza Nur, Eryanto and Hefni Efendi</p>	<p>Salah satu masalah pencemaran lingkungan yang menjadi perhatian dunia adalah pengelolaan limbah elektronik (<i>e-waste</i>). Kurangnya informasi volume timbulan sampah dan aliran material menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam pengelolaan <i>e-waste</i>. Kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi untuk mengisi data kendala terkait volume dan aliran material <i>e-waste</i> untuk penyusunan rencana pengelolaan <i>e-waste</i> yang berkelanjutan di DKI Jakarta.</p>	<p>Kajian ini memiliki fokus dan fokus yang berbeda dengan penulis. Bagi penulis yang terlibat dalam penelitian <i>e-waste</i>, penelitian ini melengkapi gambaran pengelolaan <i>e-waste</i> di DKI Jakarta yang dilakukan oleh rumah tangga, sektor formal dan informal. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui teridentifikasi beberapa permasalahan dan peta aliran <i>e-waste</i> di DKI Jakarta.</p>

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 1.5 diatas, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama karena memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Kajian sebelumnya memberikan kontribusi memperkaya pengetahuan penulis untuk memperdalam fenomena penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

1.5.2 Administrasi Publik

Definisi Chandler dan Plano tentang administrasi publik dalam Yeremias T. Keban (2008: 3) adalah suatu metode dimana untuk membuat, melaksanakan, dan memantau keputusan mengenai kebijakan publik, sumber daya dan personel publik diatur dan dikoordinasikan. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu mengelola urusan publik dan melaksanakan banyak tanggung jawabnya ditugaskan padanya.

Wawasan lain, Henry mengatakan dalam Harbani Pasolong (2007: 8), Administrasi publik adalah bidang multiaspek yang menggabungkan teori dan praktik mendorong kebijakan publik dan menumbuhkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah berinteraksi dengan rakyatnya dan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam tinjauan literturnya, McCurdy (1986) berpendapat bahwa administrasi publik dapat dipandang sebagai prosedur politik, terutama sebagai metode pemerintahan suatu negara, serta sarana utama yang menjalankan berbagai fungsi negara (Keban, 2008: 3).

Administrasi publik didefinisikan oleh Robert W. Prestus dan John M. Pfiffner adalah koordinasi upaya individu dan kelompok untuk mengimplementasikan kebijakan; melaksanakan kebijakan publik yang telah diputuskan oleh badan perwakilan politik publik. Ini terutama mencakup

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; proses implementasi kebijakan publik, keterampilan manajemen, dan berbagai metode pemberian arah dan tujuan pada upaya sejumlah orang (Syafiie, 2010: 23-24).

Pendapat ahli lainnya dikemukakan oleh Siahyan (2010:14), yang berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan prosedur untuk menempatkan keputusan yang dibuat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Ibrahim (2008: 16) merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia secara keseluruhan untuk mencapai tujuan, memanfaatkan semua sumber daya nasional dan melaksanakan tugas pemerintahan berjalan sesuai dengan UUD 1945.

Menurut George J. Gordon, manajemen kebijakan dapat dicirikan sebagai semua siklus yang diselesaikan baik oleh asosiasi maupun orang-orang yang terkait dengan menerapkan atau mempraktikkan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh dewan, badan pimpinan, dan pengadilan (Syafiie, 2010:25).

Dari beberapa perspektif tokoh dan ahli-ahli diatas, dinyatakan administrasi publik adalah prosedur penyelenggaraan pemerintahan di mana sumber daya manusia dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan mengenai penerapan atau pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Negara. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memenuhi kebutuhan publik secara

efektif dan efisien. Ilmu administrasi publik di perkembangannya sering mengalami pergeseran paradigma. Paradigma disini merupakan gambaran tentang kedudukan administrasi publik dan proses pelaksanaannya.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Landasan atau sudut pandang teori tentang nilai kebenaran, konsep, metodologi, dan pendekatan yang digunakan adalah paradigma administratif. Cara berpikir ilmuwan administrasi tentang keberatan telah berubah, mengubah makna keraguan tentang kebenaran yang dikandungnya, yang menyebabkan pergeseran paradigma ini. Paradigma yang dikembangkan oleh Nicholas Henry menunjukkan standar perilaku itu diusulkan oleh Robert T. Golembievsky menggabungkan fokus dan lokasi. Lokus mencakup wilayah atau lokasi tempat metode digunakan atau diterapkan, sedangkan fokus menanyakan wilayah atau metode utama yang digunakan untuk memecahkan masalah.

Nicholas Henry yang termasuk dalam dua kategori tersebut (Keban, 2014: 31) mengajukan lima paradigma administrasi publik yang terbagi menjadi tiga paradigma utama—paradigma administrasi publik lama (OPA) dan paradigma administrasi publik baru (NPS) yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Paradigma I : Dikotomi Politik dan Administrasi

Dalam tinjauan literturnya, McCurdy (1986) mengatakan Administrasi publik adalah proses politik, dan itu adalah salah satu dari banyak kesatuan

cara utama di mana berbagai fungsi negara dilakukan (Keban, 2008:3). Paradigma ini pertama kali dikemukakan oleh Dalam Politik dan Pemerintahan pada tahun 1900, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White.

Goodnow berpendapat bahwa administrasi harus fokus pada politik, atau mengekspresikan keinginan rakyat, sedangkan politik harus fokus pada politik harus tertarik dan memperhatikan implementasi kebijakan. Dengan demikian, perbedaan utama antara politik dan pemerintahan terletak pada pemisahan kekuasaan. Pembagian antara politik dan administrasi diwujudkan dalam pembagian antara kehendak rakyat harus dikomunikasikan oleh legislatif, dan kehendak ini harus dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal ini, peradilan membantu legislatif dalam menetapkan tujuan dan kebijakan. Ide sentral dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan bertujuan untuk membuat birokrasi negara menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Sayangnya, paradigma ini hanya berfokus pada lokusnya, yaitu birokrasi pemerintahan, tetapi tidak merinci fokus atau metode tumbuh dalam administrasi publik.

B. Paradigma II : Prinsip-Prinsip Administrasi

Willoughby, Gallick, dan Urwick adalah orang-orang dalam paradigma ini. Mereka sangat berbagai nama, termasuk Fayol dan Taylor, digunakan dalam proses manajemen. Sebagai bagian dari proses seleksi bangsa, mereka melakukan tugas administrasi. Istilah "perencanaan", "organisasi", "staf",

"pengarahan", "koordinasi", "pelaporan", dan "ganggaran" secara bersama-sama disebut sebagai "POSDCROB", dan dikatakan bersifat universal atau dapat diterapkan di mana saja. Selain itu, letak pemerintahannya juga tidak pernah jelas karena prinsip-prinsip tersebut diyakini dapat diterapkan di mana saja, termasuk dalam ketatanegaraan. Oleh karena itu, fokus daripada lokus lebih ditekankan dalam paradigma ini.

C. Paradigma III : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Morstein-Marx menganggap mustahil atau tidak realistis untuk memisahkan politik dan pemerintahan. Sementara itu, Herbert Simon menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan prinsip-prinsip administrasi yang tidak konsisten dan berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini tidak selalu diikuti. Administrasi publik sesuai di sini selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai partikular dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai. Di sini timbul konflik antara konsep manajemen bebas nilai, di satu sisi, dan konsep politik nilai, di sisi lainnya. Asumsi kedua ini ternyata benar dalam prakteknya karena John Gaus menekankan bahwa teori politik dimasukkan ke dalam teori administrasi publik.

D. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang dulu populer telah dikembangkan secara ilmiah dan menyeluruh. Dalam model ini, bertemu dua

jalur perkembangan, yaitu teori organisasi, yang berorientasi pada pengembangan ilmu administrasi murni, seperti administrasi bisnis, administrasi publik, dan sosiologi, yang berorientasi pada kebijakan publik. Sementara yang lain adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, Paradigma ini berfokus pada riset operasi dan analisis sistem karena semua strategi yang dikembangkan di sini diasumsikan dapat dimanfaatkan baik di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka lokasinya menjadi keruh.

E. Paradigma V : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Sejak dikembangkan sejak tahun 1970 fokus paradigma administrasi publik ini meliputi kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi. Sementara itu, isu dan kepentingan organisasi publik menjadi fokus utama (Keban, 2008:31-33) Ilmu politik, kebijakan ekonomi, proses kebijakan publik, dan analisis dimensi kebijakan juga berkembang. Lokusnya terletak pada masalah dan kepentingan umum. Sekitar tahun 1980-an, dikembangkan konsep baru yang memperluas cakupan konsep administrasi publik (Thoha, 2010:71-86). 3 (tiga) paradigma lain dalam administrasi public, yaitu:

1. *Old Public Administration (OPA)*

Tokoh dalam model ini berasal dari Woodrow Wilson. Wilson berpendapat dalam bukunya *The Study of Management* bahwa tantangan utama eksekutif adalah kurangnya kapasitas administratif. Reformasi administrasi publik perlu

dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pimpinan administrasi publik guna mewujudkan birokrasi negara yang efektif dan efisien. Akibatnya, diperlukan informasi untuk mereformasi birokrasi dengan membentuk aparatur negara yang professional nonpartisan. Dalam perkembangannya, birokrasi dikelola secara tertutup, sehingga organisasi kemasyarakatan terkesan kaku dan partisipasi masyarakat cenderung terbatas.

2. *New Public Management* (NPM)

New Public Management adalah sistem manajemen terdesentralisasi dengan alat manajemen baru seperti kontrol, perbandingan, dan manajemen ramping (Denhardt, J, V, 2003). NPM bertujuan pada prinsip ketangkasan, pemberdayaan, inovasi, pengembangan model manajemen, orientasi hasil berbasis hasil, dan bergerak menuju penyelesaian unit organisasi yang lebih kecil di sektor pelayanan publik.

Ciri utama NPM menurut C. Hood (1991) ada 7 (tujuh) yaitu:

- a. Terlibat administrasi mahir. Manajer profesional bertugas melaksanakan tanggung jawab pengelolaan tata kelola perusahaan.
- b. Standar dan ukuran kinerja yang jelas. Ada indikator dan standar kinerja yang jelas.
- c. Peningkatan fokus pada kontrol *output*. Peningkatan penekanan pada kontrol hasil/*output*.

- d. Langkah menuju desegregasi unit sektor publik. Tugas di bawah ini dipecah menjadi blok.
 - e. Pergeseran menuju persaingan sektor publik yang meningkat. meningkatnya persaingan sektor publik.
 - f. Fokus pada praktik manajemen di sektor swasta. Di sektor swasta, penerapan gaya manajemen mendapat perhatian lebih.
 - g. *A focus on using resources with more caution and discipline.* Peningkatan penekanan pada menjaga disiplin dan menghindari pemborosan sumber daya.
3. *New Public Service* (NPS)

Paradigma baru, yakni NPS diyakini dapat menjanjikan perubahan yang nyata dalam tatanan birokrasi pemerintahan. Menurut gagasan J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt, pemerintah tidak boleh berjalan seperti bisnis, tetapi harus melayani masyarakat dengan cara yang demokratis, adil, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Menurut Denhardt dalam Pasolong (2013: 35), 7 (tujuh) gagasan inti dari paradigma New Public Service (NPS) adalah:

- a) *Serve Citizen, Not Customers*
- b) *Seek the Public Interest*
- c) *Value Citizenship over entrepreneurship*
- d) *Think Strategically, Act Democratically*
- e) *Recognized that Accountability is Not Simple*
- f) *Serve Rather than Steer*
- g) *Value People, not Just Productivity.*

Penjelasan tentang pergeseran paradigma dalam administrasi publik, khususnya dalam kaitannya dengan tata kelola, mencontohkan pergeseran orientasi administrasi publik secara periodik dan cepat. Kajian ini termasuk dalam paradigma kelima, yakni penelitiannya mendefinisikan paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma adalah titik fokus administrasi publik yang menitikberatkan pada administrasi publik berbasis Pegawai Negeri Baru, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pelayanan publik. NPS merupakan perspektif baru administrasi publik yang berupaya menyembunyikan kelemahan paradigma *Old Public Administration* dan *New Public Administration*.

1.5.4 Manajemen Publik

Definisi manajemen menurut George Terry dalam Inu Kencana (2010: 49) adalah metode khusus untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Menurut George Terry, manajemen adalah kegiatan di mana fungsi manajemen mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang telah ditentukan sebelumnya. G. R. Terry berpendapat bahwa ada empat (empat) aspek manajemen paling mendasar yakni Perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan.

Manajemen publik merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dan non-SDM sesuai perintah kebijakan publik. OTT, Hyde, dan Shafritz dalam Pasolong (2007: 83) menekankan dalam hal ini ialah bahwa manajemen publik dan

kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih satu sama lain. Untuk membedakannya yakni dengan cara memahami manajemen publik sebagai proses menggerakkan sumber daya manusia dan non-SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Overman dalam Keban (2008: 92-93) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi interdisipliner tentang aspek umum organisasi yang menggabungkan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi prosedur pengalokasian sumber daya manusia dan bukan manusia menurut di sisi lain, politik. Pada akhirnya, implementasi kebijakan adalah cara paling umum untuk menyatukan manusia dan non-SDM sesuai "perintah" strategi negara. Overman menekankan bahwa tata kelola adalah proses memobilisasi sumber daya yang ada dan menggunakannya sesuai dengan persyaratan kebijakan publik ketika mendefinisikan administrasi publik.

Menurut Gibson, Donnelly, dan Ivancevic, manajemen adalah proses mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain oleh satu orang atau lebih untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang yang bertindak sendiri (Mukarom dan Laksana, 2015:80).

Menurut pendapat sejumlah ahli tersebut di atas, manajemen adalah proses pengerahan segala sumber daya yang ada sesuai dengan kebijaksanaan umum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.5 Pelayanan Publik

Berdasarkan Bab I, Pasal I, Bagian I, UU No. “Pelayanan Publik” didefinisikan dalam Pasal 25 UU Pelayanan Publik Tahun 2009 sebagai “suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi.” Definisi ini ditambahkan ke undang-undang pada tahun 2009 oleh penyedia layanan publik.

Gronroos mendefinisikan pelayanan sebagai “suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang tidak terlihat (untouchable) dan dihasilkan dari interaksi antara karyawan dan pelanggan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan jasa.” Gronroos mendefinisikan layanan sebagai "suatu tindakan atau serangkaian tindakan dirancang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau klien. (Muhibuddin Wijaya Laksana dan Zaenal Mukarom, 2015:80).

Utilitas menurut Kepmen PAN No. No. 63 Tahun 2003 - semua jenis jasa yang disediakan oleh badan-badan negara berupa barang atau jasa, di pusat, di daerah, dan di lingkungan, sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan dan upaya hukum pengaturan untuk memenuhi kebutuhan penduduk BUMS atau BUMS penyelenggara.

Lijan Poltak S. dalam bukunya “Reformasi Pelayanan Publik” (2010: 8-9) mendefinisikan pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Lijan Poltak menekankan bahwa pelayanan

publik ialah dimana penyelenggara negara yaitu pemerintah harus dapat memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan akan akses kesehatan dan pendidikan yang dapat terjangkau dan berkualitas, sarana prasarana umum yang memadai, dan lain-lain.

Dalam Hardiyansyah (2018:16-17) terdapat 3 unsur penting aparatur sipil negara yaitu:

1. Organisasi Pemberi Layanan / Penyedia layanan (Pemerintah)
2. Penerima layanan/ Pelanggan (Masyarakat)
3. Kepuasan yang diterima oleh penerima jasa atau pelanggan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2003, asas-asas pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Satu langkah lebih detail dari Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003, sesuai Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009, faktor-faktor berikut menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan public, yakni:

barang publik;

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Pasal 1 Bab I UU No. Sesuai dengan Pasal 25 UU Pelayanan Publik Tahun 2009, suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif disebut dengan pelayanan publik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh administrator publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara dengan menyediakan barang atau jasa dan dilakukan sesuai asas-asas pelayanan publik.

1.5.6 Inovasi

Dua perspektif dapat digunakan untuk mengkaji inovasi yaitu inovasi sebagai "aktivitas" dan "objek". Inovasi, menurut Setyaningrum (2009:81) dapat merujuk pada produk atau metode baru yang dapat digunakan, biasanya dalam lingkungan komersial. Dalam kebanyakan kasus, berbagai tingkat kebaruan dapat dibedakan berdasarkan konteksnya. Sebuah inovasi mungkin baru bagi perusahaan, pasar, atau Negara dalam hal ini, wilayah atau seluruh dunia. Proses pengembangan suatu inovasi, yang sering dikaitkan dengan komersialisasi suatu intervensi, disebut sebagai inovasi sebagai "aktivitas". Oleh karena itu, sasaran "objektif" dan "aktivitas" inovasi adalah komersialisasi dan pertumbuhan.

Menurut Yogi Suwarno, inovasi (2008: 8) adalah kegiatan yang mencakup seluruh prosedur untuk mengembangkan dan mendistribusikan jasa atau barang baru, lebih baik, atau lebih murah. Perspektif ini menekankan inovasi sebagai proses (atau aktivitas) penemuan. Sementara itu, Damanpour dalam Yogi Suwarno (2008 :9) menyebutkan inovasi adalah produk atau layanan baru, teknologi proses produksi baru, sistem administrasi dan struktural baru, atau rencana baru untuk anggota organisasi adalah contoh inovasi.

Dalam Yogi Suwarno (2008:9), Rogers mendefinisikan inovasi sebagai suatu produk, metode, atau ide yang dianggap baru oleh seseorang atau unit adopsi lain. Inovasi adalah konsep, metode, atau item baru yang dianut oleh individu atau entitas lain. Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai kebaruan suatu produk. Dengan kata

lain, inovasi terkait dengan proses penemuan aplikasi sektor bisnis dan hanya produk baru.

Menurut Albury dalam Yogi Suvarno (2008:10), inovasi sebagai ide baru yang berhasil dan memiliki manfaat. Jika ide-ide baru yang bermanfaat terkait erat dengan inovasi, hal ini bisa dimaklumi. Mengingat kebaruannya, sebuah inovasi harus memiliki nilai jual. Jika sifat baru inovasi tidak dibarengi dengan nilai manfaatnya, maka tidak akan ada gunanya. Secara rinci menjelaskan bahwa ciri inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian baru yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas, serta kualitas.

Yogi sebagaimana dikemukakan dalam LAN (2007: 113), salah satu strategi untuk memecahkan kebuntuan di sektor pelayanan publik adalah inovasi. Proses mewujudkan ide-ide baru ke dalam tindakan dikenal sebagai inovasi terapan, dan ditandai dengan perubahan bertahap, berkelanjutan, dan meluas yang berdampak signifikan pada hubungan dan organisasi. Selain itu, dalam Permenpan No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa inovasi aparatur sipil adalah jenis pelayanan publik yang disruptif, baik ide kreatif orisinal maupun ide yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta adaptasi atau modifikasi bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, inovasi kepegawaian tidak dengan sendirinya menekankan perlunya penemuan baru, tetapi hanya melibatkan

pendekatan kontekstual baru berupa inovasi kepegawaian sebagai hasil dari memperluas atau meningkatkan kualitas inovasi yang sudah ada dalam kepegawaian.

Dari beberapa definisi inovasi yang dikemukakan para ahli, mengarah pada kesimpulan bahwa inovasi adalah ide baru atau proses kreatif yang memiliki manfaat dan dapat menambah nilai suatu produk atau organisasi. Istilah inovasi dalam konteks pelayanan publik dapat diartikan sebagai pembaruan atau perkembangan baru yang diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

1.5.7 Inovasi Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk mengatakan bahwa inovasi yang sukses merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode

pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil.

Adapun tipe inovasi di sektor publik menurut Halvorsen (Thomas, et al 2005:5) terbagi menjadi 5 tipe inovasi, sebagai berikut:

1. *A new or improved service* (Inovasi yang dilakukan pada pelayanan baru atau perbaikan kepada pelayanan yang sudah ada).
2. *Process innovation* (inovasi proses) adalah perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk.
3. *Administrative innovation* (inovasi administratif) misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan
4. *System innovation* (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan yang dilakukan pada sistem yang sudah terlebih dulu ada dengan membentuk organisasi atau kerjasama baru.
5. *Conceptual innovation* (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam hasil yang dihasilkan.
6. *Radical change of rationality* (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum dari pegawai instansi pemerintah

Inovasi layanan dapat dipahami sebagai suatu proses yang berisi konsep-konsep baru dan produksi, pengembangan dan implementasi perilaku. Ini juga merupakan perubahan respon terhadap lingkungan eksternal atau tindakan pertama

akibat pengaruh lingkungan terhadap transformasi yang terjadi pada organisasi. (Lu and Tseng, 2010).

Dari beberapa definisi inovasi yang dikemukakan para ahli, Inovasi pelayanan publik bisa dikatakan adalah salah satu wujud dari semangat dan pemikiran baru penyelenggara pelayanan publik agar pelayanan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dalam hal ini inovasi pelayanan diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima layanan yakni warga negara.

1.5.8 Atribut Inovasi

Salah satu karakteristik mendasar dari inovasi adalah kebaruan. Dalam proses menggantikan pengetahuan, teknik, produk, ciri utama inovasi adalah kebaruan, apakah itu teknologi atau penemuan usang yang tidak lagi memenuhi kebutuhan tertentu atau memecahkan masalah. Yogi Suwarno mencatat dari Everett M. Rogers, mendefinisikan atribut inovasi atau kelengkapan inovasi sebagai berikut:

1. Keuntungan relatif (*Relative Advantage*).

Jika dibandingkan dengan inovasi-inovasi sebelumnya, inovasi pasti memiliki kelebihan dan nilai tambah. Inovasi harus unggul dan bernilai lebih besar dari barang atau jasa yang sebelumnya seperti yang ditunjukkan oleh atribut keuntungan relatif. Rogers mengatakan dalam Syafaruddin (2012: 34), Nilai yang dibawa inovasi ke masyarakat atau ekonomi, kesenangan, kepuasan, atau kehadiran komponen penting adalah cara untuk mengukur keunggulan atau

manfaatnya. Selain itu, penerima akan mendapat manfaat lebih dari penyebarannya yang cepat.

2. Kesesuaian (*Compability*)

Selain itu, inovasi perlu menyesuaikan dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya inovasi lama, kecuali biaya yang baru lebih besar. Proses beralih ke inovasi terbaru juga melibatkan inovasi lama. Selain itu, memiliki potensi untuk mempercepat adaptasi dan belajar berinovasi. Properti kesesuaian menyatakan bahwa produk atau layanan baru harus kompatibel dengan yang digantikannya untuk menghindari pemborosan uang pada inovasi lama. Rogers mengatakan dalam Syafaruddin (2012: 34) Diasumsikan bahwa tingkat penerapan suatu inovasi dapat ditentukan oleh nilai-nilai penerima, pengalaman sebelumnya, dan persyaratan.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Sifatnya yang baru dapat membuat inovasi lebih sulit Namun tingkat kerumitan ini biasanya tidak menjadi masalah karena perkembangannya memberikan strategi yang lebih mutakhir dan lebih baik. Kompleksitas inovasi menunjukkan betapa sulitnya bagi pengguna untuk memahami dan menerapkannya. Lokasi suatu inovasi menentukan tingkat kerumitan inovasi tersebut. Rogers mengatakan dalam Syafaruddin (2012: 34), penerima akan kesulitan memahami dan menggunakan inovasi yang terlalu kompleks. Dengan demikian, suatu inovasi perlu diperhatikan dari segi kompleksitasnya

agar dapat diketahui karakteristik inovasi tersebut sehingga dapat diadopsi oleh penggunanya.

4. Kemungkinan dicoba (*Triability*)

Suatu inovasi diterima jika telah mengalami pengujian dan terbukti lebih bermanfaat atau berharga daripada inovasi sebelumnya. Konsekuensinya, suatu produk inovasi harus menjalani fase “uji publik”, di mana semua pihak dapat menilai kualitas inovasi tersebut. Atribut peluang diuji karena inovasi tersebut harus dicoba terlebih dahulu untuk mengecek kualitas inovasi tersebut agar dapat bernilai tinggi dan diterima oleh masyarakat.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Selain itu, inovasi itu harus dapat diamati dalam hal operasinya dan outputkan. Atribut kemudahan diamati masyarakat yang dimiliki inovasi mencontohkan perlunya sebuah inovasi untuk mudah diamati cara kerjanya dan menghasilkan sesuatu yang unggul untuk mendapatkan kepercayaan tersebut akan diadopsi atau digunakan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Ide yang akan digunakan dalam penelitian untuk menemukan masalah atau menggambarkan kondisi yang ada disebut dengan operasionalisasi. Penulis penelitian ini digunakan fokus pada inovasi layanan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam program e-waste Dropbox dan e-waste collection. Sesuai dengan Peraturan Pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengangkutan, pengurangan, penyimpanan,

dan penyimpanan limbah, pembuangan, daur ulang, dan/atau pergudangan limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan sementara limbah B3 yang mencakup transportasi dan penimbunan sementara.

Atribut inovasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori atribut inovasi Rogers dalam Yogi Suvarno (2008: 17-18). Atribut inovasi ini meliputi:

1) Keuntungan relatif

Keunggulan Relatif merupakan salah satu cara untuk menentukan nilai kebaruan dalam bidang inovasi. Dalam penelitian ini keunggulan relatif digunakan untuk menganalisis sejauh mana inovasi memiliki keunggulan, manfaat, dan nilai tambah bagi penerimanya yaitu masyarakat. Inovasi *Dropbox E-Waste* di Kota Jakarta dapat diukur dari nilai-nilai kebaruan yang akan ditelaah dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a. nilai ekonomi
- b. nilai sosial
- c. kesenangan/kepuasan

2) Kesesuaian

Kesesuaian adalah metrik kedua dalam atribut inovasi. Tingkat kepatuhan dalam penelitian ini diukur dengan:

- a. Kesesuaian dengan nilai dan norma

b. Kesesuaian dengan pengalaman masa lalu.

3) Kerumitan

Kerumitan dilihat dari seberapa kompleks sebuah inovasi dapat dirasakan oleh pengguna dan pengguna memahami inovasi tersebut. Tingkat kerumitan suatu inovasi ditentukan oleh bagaimana caranya inovasi digunakan publik. Saat melakukan analisis tingkat kompleksitas layanan inovasi pengelolaan limbah elektronik di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dipelajari dengan menggunakan:

- a. Kemudahan Pemahaman
- b. Kemudahan penggunaan Inovasi
- c. Adaptasi terhadap lingkungan

4) Kemungkinan dicoba

Indikator keempat pada atribut inovasi adalah kemungkinan dicoba. Indikator ini menjelaskan bahwa inovasi yang diperkenalkan terlebih dahulu harus diuji kualitasnya agar dapat diterima masyarakat. Indikator ini digunakan untuk menilai kemungkinan diuji coba inovasi layanan pengelolaan e-waste di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Adapun indikator penilaiannya adalah:

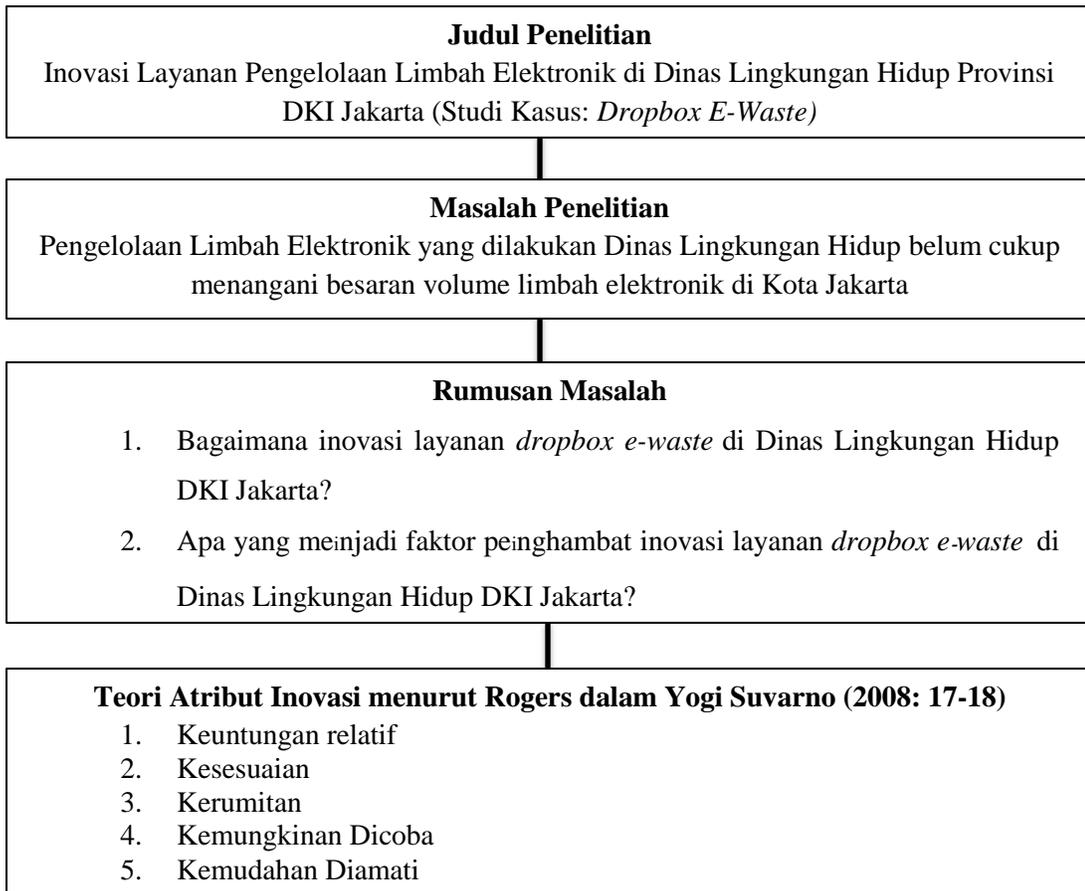
- a. Kemudahan yang bisa dicoba
- b. Kemudahan mendapatkan informasi

5) Kemudahan diamati

Kemudahan diamati adalah ketika inovasi harus mudah diamati cara kerjanya dan harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik sehingga penerima atau masyarakat dapat mempercayai penerimaan atau penggunaannya. Saat melakukan analisis, atribut kemudahan observasi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui kemudahan observasi.

Berdasarkan atribut inovasi menurut Rogers dalam Hapsari (2021:1), penulis membangun struktur yang dapat disimak pada Bagan 1.1 dibawah ini:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Menurut Singarimboon dan Effendi (1995:4-5), ada tiga jenis penelitian:

1. Studi penjelasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah hipotesis mengenai besarnya hubungan itu benar dan pengaruh antar variabel yang diteliti, menguji hipotesis yang telah dirumuskan, dan sampai pada suatu kesimpulan.

2. Studi Eksploratif

Mempelajari atau mempelajari gejala suatu masalah secara lebih mendalam merupakan tujuan dari penelitian.

3. Studi Deskriptif

Sebuah studi yang membandingkan gejala yang ditemukan untuk menggambarkan gejala tertentu.

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif. Studi kualitatif deskriptif akan digunakan berdasarkan klasifikasi dari ketiga jenis penelitian tersebut. Tujuan dari deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan lengkap, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau menarik kesimpulan, belajar dari pengalaman orang lain untuk merencanakan masa depan dan mengambil keputusan, dan mengidentifikasi masalah.

1.7.2 Situs Penelitian

Kajian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta dengan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Adapun fokus penelitian ini adalah atribut inovasi *Dropbox E-Waste* untuk menjawab permasalahan pengelolaan limbah elektronik di Provinsi DKI Jakarta.

1.7.3 Subyek Penelitian

Dalam Informan adalah individu atau organisasi yang memasok peneliti informasi tentang data yang mereka butuhkan untuk penelitian mereka dalam penelitian kualitatif. Subyek penelitian atau responden disebut sebagai informan. Dalam studi ini, subjek penelitian adalah Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Provinsi Jakarta, dan warga DKI Jakarta yang menggunakan layanan pembuangan sampah elektronik Dropbox.

1.7.4 Jenis Data

Sugiyono menegaskan (2016:137), ada dua kategori untuk tipe data:

a. Data Primer

Informasi yang datang langsung dari sumbernya disebut data primer. Memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan pada saat observasi langsung atau wawancara memberikan data pokok. Informasi informan merupakan sumber data utama untuk penelitian ini relevan yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan mereka yang telah memanfaatkan layanan *dropbox e-waste*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber secara tidak langsung. Data tambahan terdiri dari catatan-catatan dari buku, majalah, internet, dan sumber-sumber peristiwa atau kejadian lain yang pernah terjadi.

1.7.5 Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2011:11) menyatakan dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama. Selain itu, ada dokumen dan jenis data lain selain angka. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana laporan tersebut disajikan, laporan penelitian ini akan menyertakan kutipan dari data tersebut. Naskah wawancara, Catatan lapangan, foto, surat pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menegaskan (2016:225), peneliti akan menggunakan berbagai strategi pengumpulan data, diantaranya:

1) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Salah satu pendekatan pengumpulan data adalah metode wawancara. Ketika penulis ingin menemukan permasalahan yang perlu dikaji terlebih dahulu dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informan.

2) Observasi

Pengawasan adalah proses melibatkan berbagai proses mental dan biologis yang berbeda. Dua proses utama adalah observasi dan memori penting. Untuk

penelitian tentang fenomena alam, perilaku manusia, proses kerja, dan responden digunakan metode pengumpulan data observasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi tersebut merupakan tambahan penelitian ini melalui penggunaan metode wawancara dan observasi. Surat atau foto oleh seseorang semuanya bisa menjadi dokumentasi.

4) Penelitian Keputskaan

Pengumpulan data juga dilakukan berdasarkan sumber data sekunder seperti iartikel dari buku, majalah, internet dan sumber lainnya.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Muhajir (1996:104) berpendapat bahwa Upaya untuk menemukan dan menyusun catatan secara metodis dari wawancara, observasi, dan sumber lain dikenal sebagai analisis data. untuk menyajikan temuan sebagai kesimpulan kepada orang lain dan memperkuat pemahaman peneliti tentang kasus tersebut sedang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif sebagai model analisisnya, artinya data yang terkumpul akan dianalisis dalam tiga langkah yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Ditafsirkan sebagai proses seleksi yang bertujuan menyederhanakan dan mengabstraksi data dari penelitian di area tertentu.

b. Penyajian data (*data display*)

Dimaknai sebagai bermacam-macam terorganisir dari data yang mempertimbangkan menarik kesimpulan dan menerapkannya. Mengenai Penulis penelitian ini lebih menekankan pada gaya presentasi deskriptif.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dan verifikasi Ini adalah langkah terakhir dalam analisis catatan kualitatif. Untuk studi yang lebih tepat dan kesimpulan khusus yang akan ditarik dari hasil pengumpulan catatan lapangan, kesimpulan ini tergantung pada jumlah catatan yang dikumpulkan, penyimpanan, keterampilan, dan keakuratan analisis data bidang.

1.7.8 Kualitas data

Validitas penelitian kualitatif harus tinggi agar dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta di lapangan. Pengecekan validitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi metode terbagi menjadi triangulasi asli dan triangulasi teknis. Metode ini memvalidasi informasi yang melibatkan sesuatu di luar informasi untuk keperluan informasi atau pemeriksaan (Moleong, 2013: 330). Penulis penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan bahwa data yang diberikan sudah benar dan cukup lengkap untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini diwawancarai sebanyak 7 narasumber menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan sebelumnya.